

**PEMBERDAYAAN INDUSTRI KREATIF MASYARAKAT KOTA
UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI BANDAR LAMPUNG
(Studi Kasus Usaha Mikro Alyn Tapis Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**RIO ARTHAVEDA
1746041007**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KREATIF MASYARAKAT KOTA UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Usaha Mikro Alyn Tapis Kota Bandar Lampung)

**Oleh
Rio Arthaveda**

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kreativitas memiliki peluang yang besar dalam mensejahterakan masyarakat di era industri kreatif. Perkembangan era industri kreatif memberikan peluang sekaligus menjadi tantangan bagi individu dan masyarakat untuk melahirkan berbagai kreativitas di berbagai bidang. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kota Bandar Lampung memiliki potensi besar untuk pengembangan industri kreatif. Hal ini dibuktikan dengan perhatian pemerintah kota Bandar Lampung lewat program pemberdayaan industry kreatif masyarakat kota dalam menunjang pendapatan UMKM melalui Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Bandar Lampung

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang secara umum yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Penelitian ini menggunakan teori tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, Penelitian menggunakan Proses pemberdayaan dari Fachrudin 2011, Enabling, Empowering, Protecting serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di kota Bandar Lampung

Kata Kunci : Pemberdayaan Industri Kreatif, UMKM, Perubahan Sosial

ABSTRACT**CREATIVE INDUSTRY EMPOWERMENT OF CITY COMMUNITIES
TO SUPPORT MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME)
INCOME IN BANDAR LAMPUNG
(Case Study of Alyn Tapis Micro Enterprises in Bandar Lampung City)****By****Rio Arthaveda**

Community empowerment through the development of creativity has a great opportunity for the welfare of society in the era of the creative industry. The development of the creative industry era provides opportunities as well as challenges for individuals and society to give birth to various creativity in various fields. As the center of economic growth, the city of Bandar Lampung has great potential for the development of creative industries. This is evidenced by the attention of the city government of Bandar Lampung through the empowerment program for the creative industry of the city community in supporting MSME income through the Bandar Lampung City Cooperative and MSME Service

This study uses a qualitative approach in general, namely research procedures that produce descriptive data in the form of written words. This study uses a theory about the role of government in empowering MSMEs, research uses the empowerment process from Fachrudin 2011, Enabling, Empowering, Protecting and analyzes the supporting and inhibiting factors in community empowerment in the city of Bandar Lampung.

Keywords: *Creative Industry Empowerment, MSMEs,*

**PEMBERDAYAAN INDUSTRI KREATIF MASYARAKAT KOTA
UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI BANDAR LAMPUNG
(Studi Kasus Usaha Mikro Alyn Tapis Kota Bandar Lampung)**

Oleh

Rio Arthaveda

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

Judul Skripsi : **PEMBERDAYAAN INDUSTRI KREATIF MASYARAKAT KOTA UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Usaha Mikro Alyn Tapis Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rio Arthaveda**

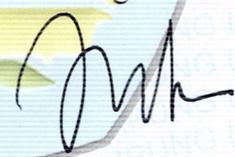
Nomor Pokok Mahasiswa : **1746041007**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

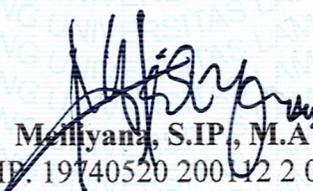
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Devi Yulianti, S.A.N., MA
NIP. 19850705 200812 2004


Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D
NIP. 19850620 200812 2001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Mellyana, S.IP., M.A
NIP. 19740520 200112 2 002

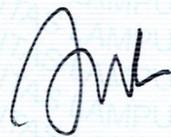
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

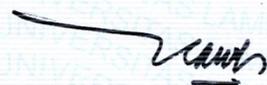
Ketua : Devi Yulianti, S.A.N., MA



Sekretaris : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.



Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP 1961807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Agustus 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Rio Arthaveda
NPM 1746041007

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rio Arthaveda, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 14 Oktober 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Iwan Suseno dan Ibu Siti Nur Fatimah.

Sebelum menyelesaikan masa pendidikan di jenjang sarjana, penulis telah menyelesaikan pendidikan formal di TK Pertiwi Bandar Lampung, lalu melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 1 Rawa Laut, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 04 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Bandar Lampung, dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Paralel. Pada tahun 2020, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Pangung, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara. Serta mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Polresta Bandar Lampung.

MOTTO

“Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah 286)

“Cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kami, sebaik-baiknya pelindung dan
sebaik-baiknya penolong kami”

(Q.S Al Imran 173)

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q.S Ar Rahman)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa
kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Iwan Suseno dan Ibu Siti Nur Fatimah

Serta Adikku

Para Dosen Dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan dan semangat

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, yang selalu mengalir kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PEMBERDAYAAN INDUSTRI KREATIF MASYARAKAT KOTA UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Devi Yulianti, S. A.N.,MA Selaku dosen pembimbing utama, Terimakasih penulis ucapkan atas saran, nasihat, waktu serta kesabaran selama proses bimbingan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D Selaku dosen pembimbing kedua, Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingannya, saran, nasihat, arahan dan waktu selama proses bimbingan. Penulis sangat terbantu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si, Selaku dosen pembahas dan penguji, penulis mengucapkan terimakasih atas arahan, saran, kritik, masukan, serta nasihat selama proses bimbingan skripsi.
4. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos. M.Si Selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas ilmu, nasihat dan bantuan selama proses perkuliahan.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Ita Prihantika., S.Sos., M.A Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas ilmu, nasihat dan bantuan selama proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu, dan nasihat selama proses perkuliahan.
7. Bapak Jauhari dan Mbak Wulan selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas bantuan administrasi selama perkuliahan.
8. Ibu Elsi Wijayanti, S.H selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Bandar Lampung, Bapak Aditya Indradi, S.IP selaku Sub Bagian Program keuangan dan aset Dinas industri Kota Bandar Lampung, Bapak Sami Muhktarom, S.E selaku Sub Bag Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Prov Lampung, ibu Elvi Dewi, S.E selaku Kepala Sub Bag Program, Keuangan dan Aset Dinas koperasi Dan UMKM Kota Bandar Lampung, Ibu Rosmawati, S.E., MM selaku Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kora Bandar Lampung. penulis mengucapkan terimakasih atas ketersediaan waktu dan bantuan selama proses pengambilan data penelitian.
9. Kedua Orang Tuaku, Bapak Iwan Suseno dan Ibu Siti Nur Fatimah terimakasih banyak untuk doa, perhatian, kasih sayang serta dukungannya yang telah diberikan untuk penulis selama ini.
10. Adikku, Muhammad Rico Andrino terimakasih untuk doa dan dukungan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Diriku, terimakasih sudah mau berjuang sampai dititik ini. Terimakasih sudah bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Untuk *special someone* Esi Mayasari karya terbaik tuhan, terimakasih sudah menjadi *support system* di penghujung cerita perskripsian.
13. Temanku, Yuendi, Ilham, Rahmat, Sangaji, Andre terimakasih sudah menjadi Teman keluh kesahku di akhir perskripsian. dan teman-teman baik lainnya yang belum penulis sebutkan. Terimakasih atas bantuan selama proses perkuliahan.
14. Team KKN di Pulau Pangung, Eron, Ratih, Hafidzah, Shafa, Agung, Deby, Caca, Cici terimakasih untuk pengalaman 40 hari yang amat berkesan dan tidak terlupakan. Putri, Else, Yuendi terimakasih sudah menjadi partner PKL selama 30 hari di Satlantas Polresta Bandarlampung.
15. Keluarga Besar Angkasa, terimakasih untuk semua kebersamaan dari awal perkuliahan yang telah kita lalui sampai saat ini.
16. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2022

Rio Arthaveda

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Masalah	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN TEORI.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Konsep administrasi Publik Dan Pemberdayaan.....	15
1. Administrasi Publik.....	15
2. Konsep Pemberdayaan	19
C. Konsep Industri Kreatif	28
1. Sektor dalam Industri Kreatif	30
2. Pilar Industri Kreatif Di Indonesia	31
3. Indikator Keberlangsungan Industri Kreatif.....	33
D. Konsep Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	33
1. Pengertian UMKM	34
2. Kriteria UMKM.....	36
E. Kerangka Pikir.....	37
III. METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Tehnik Pengumpulan Data	44
G. Tehnik Analisis Data	45
H. Tehnik Keabsahan Data.....	47
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	49
1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung	49
2. Industri Kreatif Kota Bandar Lampung.....	52
3. Data 16 Sub Sektor Industri Kreatif	

	Kota Bandar Lampung	52
4.	Potensi 3 Usaha Industri Kreatif Unggulan Kota Bandar Lampung.....	53
5.	Pemetaan Tiga Industri Kreatif Unggulan Kota Bandar Lampung	54
6.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B.	Hasil Penelitian.....	58
1.	Bentuk Pemberdayaan Industri Kreatif Masyarakat Dalam Menujang Pendapatan UMKM di Kota Bandar Lampung	59
a.	Aspek Penyelenggaraan Pembinaan.....	59
b.	Bantuan Pengaksesan Permodalan	63
c.	Fasilitator pengembangan UMKM.....	67
2.	Proses Pemberdayaan Industri Kreatif Masyarakat Dalam Menujang Pendapatan UMKM di Kota Bandar Lampung	69
a.	<i>Enabling</i>	69
b.	<i>Empowering</i>	71
c.	<i>Protecting</i>	75
3.	Faktor Pendukung dan penghambat pemberdayaan Industri Kreatif Masyarakat Di Kota Bandar Lampung.....	76
C.	Analisis Dan Pembahasan	83
1.	Bentuk Pemberdayaan Industri Kreatif Masyarakat Dalam Menujang Pendapatan UMKM di Kota Bandar Lampung	83
a.	Aspek Penyelenggaraan Pembinaan.....	85
b.	Bantuan Pengaksesan Permodalan	87
c.	Fasilitator pengembangan UMKM.....	89
2.	Proses Pemberdayaan Industri Kreatif Masyarakat Dalam Menujang Pendapatan UMKM di Kota Bandar Lampung	90
a.	<i>Enabling</i>	91
b.	<i>Empowering</i>	92
c.	<i>Protecting</i>	94
3.	Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan Industri Kreatif Masyarakat Di Kota Bandar Lampung.....	95
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran	105
	 DAFTAR PUSTAKA.....	 107

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Perusahaan Industri Kreatif Di Kota Bandar Lampung Tahun 2021	09
2. Penelitian Terdahulu	13
3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	25
4. Strategi Pemberdayaan Strategi Pemberdayaan dengan mempertimbangkan tiga bentuk intervensi	27
5. Jenis Usaha Sesuai Kriteria Aset Dan Omset	36
6. Informan Penelitian.....	44
7. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung 2020-2021	50
8. Jumlah Industri Kreatif Di Kota Bandar Lampung.....	53
9. Daftar Nama Komunitas Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung	62
10. Daftar UMKM Yang Menerima Bantuan Dana Dari Kementrian Koperasi Dan UMKM RI.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	39
2. Pemetaan Industri Kreatif Di Kota Bandar Lampung.....	54
3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan UMKM Bandar Lampung	57
4. Pelatihan Kriya Berbahan Dasar Tapis	61
5. Proses Usulan Penetapan Dan Pencairan Bantuan Pemerintah Untuk Pengembangan UMKM Pemula Tahun 2020	65
6. Alur Pengajuan Bantuan Pemerintah Untuk Pengembangan UMKM Pemula Tahun 2020	66
7. Bazar Festival Kemilazu Tapis Kota Bandar Lampung.....	74

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan produk domestik bruto.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Berbagai upaya pengembangan UKM telah dilakukan, salah satunya dengan membangkitkan dan memperbanyak orang atau pengusaha baru di bidang UKM, sehingga masyarakat desapun diberi keterampilan dengan harapan keterampilan tersebut menjadi sebuah usaha kreatif yang memberi manfaat bagi perekonomian keluarga dan masyarakat desa. Selain itu, usaha kreatif tersebut juga dapat

membukan kesempatan dan lapangan kerja baru bagi masyarakat (Wahyudi, 2012).

Indonesia dikenal sebagai negara pekerja, pernyataan tersebut dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia mencari peruntungan sebagai pekerja, baik pekerja formal maupun pekerja informal. Bahkan banyak penduduk Indonesia yang mencari peruntungan di negara lain sebagai asisten rumah tangga dan pekerjaan informal lainnya. Masih sedikit penduduk Indonesia yang mencari peruntungan dengan berwirausaha. Fakta tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang bukan negara maju. Salah satu alternatif pertumbuhan ekonomi nasional adalah seberapa banyak penduduknya yang mendapat penghasilan cukup besar dengan berwirausaha. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008), industri kreatif adalah industri yang memanfaatkan kreatifitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan & lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Industri kreatif menjadi alternatif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Berbeda dengan industri mainstream lain yang lebih cenderung mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sektor industri kreatif lebih cenderung mengandalkan keunggulan sumber daya manusia dalam hal ini ide-ide kreatif yang dituangkan dalam meraup keuntungan finansial. Ada beberapa sektor dalam industri kreatif yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang. Sektor dalam industri kreatif yang paling banyak digeluti oleh pelaku usaha adalah di sektor pariwisata, budaya, dan kuliner. Kita bisa melihat salah satu negara maju yaitu China. China merupakan negara maju dengan kepadatan penduduk yang mencapai 1,4 milyar individu, terbanyak pertama di dunia diikuti oleh India di posisi kedua lalu Amerika dan Indonesia di posisi ketiga dan keempat. Namun demikian, 14% dari keseluruhan penduduk China adalah seorang wirausaha, fakta yang berbanding terbalik dengan Indonesia yang menurut data kementerian perindustrian tahun 2019 hanya 3% penduduk Indonesia yang berwirausaha. Sejatinya pemerintah Indonesia telah mencanangkan beberapa program yang mendorong penduduknya agar lebih

berani dalam mencari peruntungan dalam berwirausaha. Salah satu program yang disuarakan oleh pemerintah Indonesia adalah tentang industri kreatif.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan salah satunya dengan cara mengedepankan sektor industri. Tidak hanya mengandalkan bidang industri sebagai sumber ekonomi negara tetapi juga mengandalkan Sumber Daya Manusia yang kreatif. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa juga tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Menurut beberapa sumber, yang dimaksud dengan ekonomi kreatif adalah merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, pengetahuan skill dan talenta, daripada sumber daya tenaga. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sehingga diperlukan pengetahuan tentang potensi diri dan lingkungan budaya setempat, dari warga kampung masing-masing sebagai sumber hidup dan tempat tinggalnya. Alvin Toffler (1980) dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksikan gelombang keempat yang merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan gagasan kreatif.

Inilah yang dinamakan era ekonomi baru yang mengutamakan informasi dan kreativitas yang populer dengan sebutan Industri Kreatif atau Ekonomi Kreatif yang digerakkan oleh sektor industri yang bersangkutan di bidangnya. Industri kreatif sendiri merupakan pengembangan konsep berdasarkan modal kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pergeseran dari Era Pertanian ke Era Industrialisasi, disusul dengan Era Informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan baru di bidang teknologi informasi maupun globalisasi ekonomi, telah membawa

peradaban baru bagi manusia.. Khristianto (2012) menyatakan industri kreatif Indonesia memunculkan harapan besar bagi tumbuhnya sebuah ekonomi baru berbasis kreatifitas dan ide. Melalui industri kreatif maka ekonomi Indonesia tidak tergantung pada faktor-faktor produksi konvensional, seperti sumber daya alam, sumber daya modal dan teknologi. Kreatifitas yang menjadi modal dalam industri kreatif diharapkan dapat menciptakan peluang kerja sebagai hasil dari kekayaan dan muatan intelektual tersebut. Menurut ahli ekonomi Paul Romer (1993), ide adalah barang ekonomi yang sangat penting, lebih penting dari objek yang ditekankan di kebanyakan model-model ekonomi. Di dunia dengan keterbatasan fisik ini, adanya penemuan ide-ide besar bersamaan dengan penemuan jutaan ide-ide kecil-lah yang membuat ekonomi tetap tumbuh. Ide adalah instruksi yang membuat kita mengkombinasikan sumber daya fisik yang penyusunannya terbatas menjadi lebih bernilai. Romer juga berpendapat bahwa suatu negara miskin karena masyarakatnya tidak mempunyai akses pada ide yang digunakan dalam perindustrian nasional untuk menghasilkan nilai ekonomi, menjadi lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dengan memanfaatkan apa saja yang tampak di mata.

Definisi industri kreatif yang saat ini lebih dekat dan lebih banyak digunakan oleh banyak para pelaku industri kreatif adalah definisi berdasarkan UK DCMS Task Force 1998 yaitu *“Creatives Industries as those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property and content”*. Pada studi pemetaan industri kreatif yang juga dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2007-pun juga menggunakan acuan definisi industri kreatif yang sama sehingga industri kreatif di Indonesia dapat didefinisikan sebagai *“Industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut”*.

Istilah Industri kreatif mulai dikenal secara global sejak munculnya buku *The creative economy: How People Make Money From Ideas* (Howkins, 2001).

Howkins menyadari lahirnya gelombang ekonomi baru berbasis kreativitas setelah melihat pada tahun 1997 Amerika Serikat menghasilkan produk-produk hak kekayaan intelektual senilai 414 juta dolar yang menjadikan HKI ekspor nomor 1 AS. Howkins dengan ringkas mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai “The creation of value as result of idea John Howkins secara sederhana menjelaskan ekonomi kreatif dapat disarikan sebagai berikut: Kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan. Dari sebagian besar hasil studi pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan pada beberapa negara diperoleh fakta bahwa kelompok industri kreatif memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian suatu bangsa.

Pada tahun 2012, geliat industri kreatif di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan sekarang ini sebagian orang mulai memprediksikan pertumbuhan industri kreatif bisa melonjak cukup tinggi yakni hingga mencapai tiga kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat kita lihat dari pertumbuhan industri kreatif yang semakin hari semakin aktif, sehingga penyerapan tenaga kerja serta kapasitas daya cipta di negara kita mulai merangkak naik dan memberikan dampak yang cukup positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Tahun 2013 ekonomi kreatif sebenarnya adalah wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas, yang mana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Kagungan dan Yulianti (2019:17) telah berkembang menjadikan sektor yang memiliki potensi selain sektor pertambangan. Pengembangan pariwisata juga dapat mempertahankan proses ekologis dan membantu melestarikan warisan alam dan buatan manusia serta keragaman hayati. Namun, harus dikelola dengan serius yang melibatkan berbagai stakeholder terkait karena pembangunan dan

pengembangan pariwisata merupakan hasil keberlanjutan jangka panjang dengan perencanaan dan dukungan dari semua pihak. Dengan kata lain, ekonomi kreatif merupakan manifestasi yang sangat penting untuk mempertahankan perekonomian bagi negara-negara maju dan juga menawarkan peluang yang sama untuk negara-negara berkembang. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2013, peran besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan bahkan tak terbatas, yaitu ide, talenta dan kreativitas. Kemunculan konsep “ekonomi kreatif” di era globalisasi telah menarik minat berbagai negara, termasuk Indonesia untuk menggunakan konsep ini sebagai model pengembangan ekonomi, diantaranya “ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya manusia (SDM) kreatif dan inovatif”.

Industri kreatif sendiri merupakan pengembangan konsep berdasarkan modal kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Fitriana, 2014). Pemberdayaan masyarakat dan kreativitas sesungguhnya bukan fenomena yang sama, tetapi keduanya dapat saling melengkapi. Kedua hal tersebut dapat bersinergi dengan baik melalui penciptaan lingkungan yang kondusif.

Industri kreatif saat ini mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 berpidato “... *we now must look at the creative and culture industry as the way to our economic future*”, pernyataan presiden SBY tersebut, mencerminkan bahwa pemerintah telah lama menyadari dan memposisikan industri kreatif nasional sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif ditandai dengan perubahan nomenklatur kementerian dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif melalui peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, harapannya adalah industri kreatif mampu menyokong perekonomian di tingkat daerah kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia (Mari Elka

Pangestu: 2008, 29). Keberadaan industri kreatif di Indonesia seharusnya sudah lama harus dikembangkan namun selama ini tidak semua pihak mampu melihat secara utuh tentang industri kreatif padahal Indonesia mempunyai banyak potensi industri kreatif yang mampu dikembangkan. Menurut Rencana pengembangan industri kreatif Indonesia ada 14 sub sektor yang termasuk dalam pengembangan industri kreatif , yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, film (video maker), permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, percetakan, layanan komputer, radio, televisi, riset dan pengembangan (Suryana, 2010).

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kreativitas memiliki peluang yang besar dalam mensejahterakan masyarakat di era ekonomi kreatif. Perkembangan era ekonomi kreatif memberikan peluang sekaligus menjadi tantangan bagi individu dan masyarakat untuk melahirkan berbagai kreativitas di berbagai bidang (Musthofa dan Gunawijaya, 2016) Modal utama yang dibutuhkan di bidang industri kreatif bukan modal fisik skala besar atau mesin besar, melainkan modal tenaga kerja yang kreatif dan tahan banting, penggabungan antara kreatifitas, keahlian, dan bakat individu. (Rappaport, 1981; Zimmerman & Warschausky, 1998). Pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses di mana individu belajar melihat lebih dekat hubungan antara tujuan mereka dan cara bagaimana mencapainya, dan hubungan antara usaha dan hasil yang mereka peroleh (Mechanic, 1991). Sedangkan dalam pemahaman yang lain, pemberdayaan adalah proses yang disengaja dan berkelanjutan yang difokuskan pada masyarakat setempat, yang melibatkan rasa saling menghormati, refleksi kritis, perhatian, dan partisipasi kelompok, di mana orang-orang yang tadinya kurang mendapatkan pembagian sumber daya yang sama akan lebih mendapatkan akses dan dapat mengontrol sumber daya tersebut (Cornell Empowerment Group, 1989).

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, Bandar Lampung memiliki potensi besar untuk pengembangan industri kreatif. Hal ini dibuktikan dengan perhatian pemerintah Indonesia lewat program Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yang menjadikan Bandar

Lampung sebagai kota pertama (kick off) dalam rangkaian BEKFRAF Developer Day 2019. (*BANDAR LAMPUNG CREATIVE HUB*, 2019).

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menggenjot usaha ekonomi khususnya Industri Kreatif yang ada diseluruh wilayah provinsi itu. Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim membuka acara sekaligus meresmikan soft launching Pasar Kreatif dan Seni (Paksi) Way Halim, di Bandarlampung Kegiatan yang ditaja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) dan Asosiasi Ekonomi Kreatif Nusantara (AEKEN) memiliki tujuan agar terciptanya sinergi dan ekosistem industri kreatif yang terintegrasi dengan pariwisata Provinsi Lampung bisa menjadi bagian dari dunia global dengan mengedepankan sumber daya manusia dan produk ekonomi kreatif yang berdaya saing.

Selain itu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung melaunching kegiatan Bazar Rebo UKM/IKM yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, bertempat di Halaman Kantor Disperindag Provinsi Lampung, Rabu, 2 Juni 2021. Kegiatan Bazar Rebo ini dimaksudkan untuk memperkenalkan produk-produk IKM kepada seluruh masyarakat lokal baik yang bertindak sebagai konsumen maupun para pelaku ekspor atau pelaku perdagangan dalam negeri, meningkatkan akses pasar, serta sebagai upaya membentuk kelembagaan UKM/IKM dengan jenis usaha yang sama agar dapat saling memperkuat dan berbagi informasi guna peningkatan daya saing bersama. Dengan digelarnya kegiatan Bazar Rebo ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kinerja UKM/IKM sehingga dapat menghasilkan industri kreatif yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas produknya.

Gubernur Lampung menjelaskan, industri kreatif mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta nasional, karena mampu menyerap ribuan tenaga kerja bagi sektor padat karya. Sektor industri kreatif jika telah dikembangkan secara optimal, mampu menyerap tenaga kerja. Jika

ini terjadi maka mampu membuat nama baik provinsi terkenal, dan bisa membantu pembangunan pariwisata, jelasnya. Menurutnya, perkembangan industri dan pariwisata harus bisa berjalan barengan, karena ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta membantu pendapatan asli daerah (PAD) Lampung. Harapan kita, terjadi peningkatan disektor industri kreatif, pemerintah akan bekerjasama dengan pengurus Dekranasda seluruh kabupaten kota mendukung agar pengrajin bisa lebih baik.

Tabel. Jumlah Perusahaan Industri Kreatif di Kota Bandar Lampung Tahun 2021

No	Sub Sektor	Jumlah	Persentase
1	Arsitektur	108	0,30
2	Desain Interior	6	0,02
3	Desain Komunikasi Visual	2	0,01
4	Desain Produk	156	0,43
5	Film/animasi dan Video	5	0,01
6	Fotografi	272	0,75
7	Kriya	2.819	7,81
8	Kuliner	26.118	72,32
9	Musik	281	0,78
10	Fasion	5.370	14,87
11	Aplikasi dan Game Developer	55	0,15
12	Penerbitan	692	1,92
13	Perikanan	18	0,05
14	Televisi dan Radio	21	0,06
15	Seni Pertunjukan	104	0,29
16	Seni Rupa	86	0,24
		36.113	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2021

Terlihat dari sub sektor industri kreatif di Kota Bandar Lampung di atas, bahwa sektor kuliner merupakan industri kreatif terbanyak di Kota Bandar Lampung, yaitu sebanyak 26.118 atau 72,32 persen (%) dari total industri kreatif. Kemudian sub sektor terbesar kedua yaitu sektor fashion sebanyak 5.370 atau 14,87 persen (%) dari total industri kreatif, dan selanjutnya sub sektor terbesar ketiga yaitu kriya sebanyak 2.819 atau 7,81 persen (%) dari total industri kreatif di Kota Bandar Lampung. Ada pun kawasan industri kreatif sektor kuliner di Kota Bandar Lampung yaitu di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kelurahan Segala Mider (Gang PU) dan Kecamatan Teluk Betung Selatan

kelurahan pesawahan dimana kawasan tersebut merupakan kawasan pusat industri kuliner di kota Bandar Lampung khususnya UMKM Keripik pisang yang di jadikan salah satu oleh oleh khas dari Kota Bandar Lampung, UMKM keripik pisang yang berada di dua kawasan tersebut masih beroperasi hingga saat ini karena letak kawasan sentra industri keripik Lampung yang berada di dua kawasan tersebut yang berada di tengah pusat kota menjadikan tempat ini ramai di kunjungi masyarakat Lampung maupun luar Lampung yang berkunjung ke Lampung. Selain itu di sektor kerajinan ada salah satu industri kreatif yang terkenal di kota Bandar Lampung yaitu Griya Batik Gabovira. Griya batik satu ini berlokasi di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, yang merupakan salah satu kawasan di Lampung yang menjadi sentra batik. Selain Griya Batik, di kawasan ini banyak sekali masyarakat yang berprofesi menjadi perajin batik tulis Lampung.

Pengembangan industri kreatif yang dilakukan di Kota Bandar Lampung adalah sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM, dan Koperasi melalui pengembangan sentra-sentra ekonomi kreatif berbasis sumberdaya dan keunggulan lokal. Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini sektor industri kreatif diharapkan dapat memberikan alternatif yang baik dalam memberikan solusi untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor ekonomi kreatif mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan dapat dilakukan oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Ide dan gagasan kreativitas tersebut dapat dituangkan untuk melahirkan produk dan jasa yang bernilai ekonomis bagi para pelaku ekonomi kreatif.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pemberdayaan Industri Kreatif Masyarakat Kota Untuk Menunjang Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Bandar Lampung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberdayaan Industri Kreatif Masyarakat kota Dalam Menunjang Pendapatan UMKM Di Usaha Mikro Alyn Tapis di Kota Bandar Lampung ?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan industri kreatif masyarakat kota dalam Menunjang Pendapatan UMKM Di Usaha Mikro Alyn Tapis di Kota Bandar Lampung

C. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemberdayaan industri kreatif masyarakat kota Dalam Menunjang Pendapatan UMKM Di Usaha Mikro Alyn Tapis di Kota Bandar Lampung
2. Mendeskripsikan dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan industry kreatif masyarakat kota dalam Menunjang Pendapatan UMKM Di Usaha Mikro Alyn Tapis di Kota Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan informasi bagi penulis dan pihak yang berkepentingan terhadap pemberdayaan industry kreatif masyarakat kota Bandar Lampung
- b. Sebagai penyemangat bagi para pelaku industry kreatif dalam mengelola atau mengembangkan potensi-potensi untuk meningkatkan pendapatan

2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang administrasi negara
- b. Dapat menjadi bahan pengaplikasian teori yang diterima di bangku perkuliahan untuk diaplikasikan dalam bidang kehidupan.

II. TINJAUAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneli dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang di jadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain :

Tabel. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
1	Duhita Mayangsari (2010)	Analisis Potensi Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Di Wilayah Kota Semarang Dalam Pengembangan Industri Kreatif	Hasil dari penelitian ini adalah Kota Semarang memiliki kekayaan karakteristik kehidupan sosial yang berasal dari perpaduan etnis, budaya dan agama. Potensi sosial masyarakat Kota Semarang tersebut dapat dikemas dalam industri kreatif yang mengedapankan inklunsi sosial, yaitu mencakup keterbukaan, toleransi dan interaksi sosial. Industri kreatif yang dapat dikembangkan adalah jenis industri yang mampu	Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada persamaan dampak perubahan sosial ekonomi industri kreatif. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Duhita Mayangsari lebih memfokuskan potensi sosial masyarakat untuk dapat dikemas dalam industri kreatif, sedangkan peneliti memfokuskan faktor pengmabat dan pendukung dalam pemberdayaan industry kreatif masyarakat dalam menunjang pendapatan UMKM

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
			mengkombinasikan berbagai karakter budaya sehingga mengedepankan citra kota dan budaya Semarang yang unik.	di Bandar Lampung
2	Murni Retiwiranti (2018)	Analisis pemberdayaan industry Kreatif pada Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Budidaya Tanaman Biofarmaka (Studi Pada Petani Kencur Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya industry kreatif yang dilakukan petani kencur Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat membantu petani dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dibandingkan saat petani hanya menjual kencur dalam bentuk rimpang segar.	Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian Murni Retiwiranti. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji mengenai pemberdayaan industry kreatif dalam meningkatkan pendapatan. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Murni Retiwiranti yaitu lokasi, perspektif dan objek yang menjadi narasumber dalam penelitian
3	Bagus Udiyansyah (2014)	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Industri Kreatif dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi	Hasil penelitian ini adalah kebijakan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pasuruan sangat mendukung peningkatan ekonomi lokal. Industri kerajinan alat tenun di	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mendapatkan data yang lebih mendalam. Selain itu juga sama-sama membahas tentang industry kreatif kreatif, namun perbedaannya

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
		Kasus Industri Kerajinan Alat Tenun di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan	Kecamatan Purwosari merupakan potensi unggulan daerah yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan kontribusi bagi peningkatan, menurunkan pengangguran dan kemiskinan.	penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada pemberdayaan industry kreatif masyarakat dalam menunjang pendapatan UMKM di Bandar Lampung

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

B. Administrasi Publik dan Pemberdayaan

1. Administrasi Publik

Organisasi merupakan sekelompok orang yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Siagian dalam Indradi (2010:18) menyebutkan bahwa organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan nama terdapat seorang/beberapa orang yang disebut bawahan. Kegiatan administrasi dibutuhkan sebagai upaya untuk melakukan perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam perkembangan administrasi sebagai ilmu, maka pengertian administrasi itu sendiri mengalami perkembangan, mulai dari yang memandang administrasi sebagai usaha, manajemen, proses, hingga pada pemerintahan.

Administrasi yang selama ini dikenal berasal dari kata *administrare* dari bahasa latin, yaitu *ad* yang berarti pada dan *ministrare* yang berarti melayani. Mengutip dari Indardi (2010:1) administrasi dapat juga berasal dari kata *administration (to administer)*. Kata *to administer* ini dapat berarti *to manage*

atau mengelola dan to direct yang berarti menggerakkan sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan kegiatan mengelola dan menggerakkan. Siagian (2014) mengartikan administrasi sebagai keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Darmadi dan Sukidin (2011) administrasi memiliki arti sempit dan arti luas:

- a. Arti sempit: administrasi merupakan penyusunan, pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis serta memudahkan memperolehnya kembali.
- b. Arti luas: istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Namun tidak semua kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang bisa disebut administrasi.

The Liang Gie dalam Indradi (2010: 18) menyebutkan bahwa administrasi yang sempurna harus memiliki delapan unsur yang saling bertautan dan tidak dapat terpisahkan. Kedelapan unsur tersebut yaitu organisasi, manajemen, tata hubungan, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha/perkantoran, dan perwakilan/hubungan masyarakat. A. Dunsire dalam Keban (2008:2) mengartikan administrasi sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahannya, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Berdasarkan dari beberapa pengertian administrasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan mengelola dan menggerakkan yang dilakukan secara kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Administrasi memiliki tiga ruang lingkup menurut Hutabarat dalam Indradi (2010: 71) yaitu administrasi negara (*public*

administration), administrasi swasta/privat (*privat administration*) dan administrasi internasional (*international administration*).

Administrasi publik sebagai salah satu ruang lingkup administrasi menurut Keban (2004:6,15) adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknis efisiensi dan efektivitas dan lebih menguntungkan masyarakatnya.

Orientasi administrasi publik saat ini diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat dan lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi kepada kepentingan publik. Administrasi publik lebih menekankan kepada peranan publik untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, oleh karena itu setiap kegiatan dalam administrasi publik diupayakan tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasio terbaik antara input dan output. Administrasi publik menurut Tjokroamidjoyo dalam Tjiptoherijanto dan Manurung (2010:112) memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

a. Formulasi kebijakan

Fungsi formulasi kebijakan memiliki empat subfungsi, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program/strategi dan pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera.

b. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi

Unsur-unsur administrasi yang perlu dikelola ialah struktur organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi

adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut diatas. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi tidak lain adalah pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan kapasitas administrasi publik.

c. Penggunaan dinamika administrasi

Dinamika administrasi meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi. Jika pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi lebih menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik, maka penggunaan dinamika administrasi menekankan pada aspek manajemen dari administrasi publik.

Berdasarkan fungsi administrasi publik tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi administrasi publik lebih kepada untuk apa administrasi publik tersebut dilaksanakan. Administrasi publik memiliki ruang lingkup atau cakupan sehingga dapat mempermudah proses pelaksanaan administrasi publik. Menurut Nicholas Henry dalam Pasolong (2012:64) dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain dari perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, yaitu:

- a. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- b. Manajemen publik, berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia.
- c. Implementasi, menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Pada hakikatnya ruang lingkup atau cakupan dari administrasi publik sangat kompleks dan bergantung dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Dimock dan Dimock dalam Pasolong (2012:64) membagi ruang lingkup administrasi publik kedalam empat komponen, diantaranya:

- a. Apa yang dilakukan pemerintah: pengaruh kebijakan dan tindakan-tindakan politis, dasar-dasar, wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan administratif yang bersifat ke dalam, dan rencana-rencana.
- b. Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, dan pembiayaan usaha-usahanya; struktur administrasi dari segi formalnya.
- c. Bagaimana para administrator mewujudkan kerjasama (teamwork). Aliran dan proses administrasi dalam pelaksanaan, dengan titik berat pada pemimpin, tuntutan, koordinasi, pelimpahan wewenang, hubungan pusat dengan bagian-bagian, pengawasan, moril, hubungan masyarakat dan sebagainya.
- d. Bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab, baik mengenai pengawasan dalam badan-badan eksekutif sendiri, dan yang lebih penting lagi mengenai pengawasan oleh badan-badan perwakilan rakyat, badan-badan yudikatif dan berbagai badan-badan lainnya.

Administrasi publik sebagai ilmu memiliki perkembangan, salah satunya adalah pengembangan administrasi publik ke arah pembangunan. Dapat dikatakan administrasi pembangunan adalah disiplin ilmu yang belum berkembang dikarenakan administrasi pembangunan belum diakui sebagai cabang ilmu pengetahuan secara universal. Perkembangan tersebut terarah kepada dua fokus, yaitu administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau mengalami perubahan dan kepada masalah interelasi antara administrasi sebagai ilmu maupun praktik di bidang-bidang lainnya. Administrasi publik cenderung memberikan perhatian terhadap pelaksanaan dan pencapaian dari tujuan pembangunan itu sendiri yang kemudian dijadikan kecenderungan atau gagasan dari administrasi pembangunan.

2. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) menjadi salah satu konsep unggulan dalam serangkaian strategi pembangunan dewasa ini. Terutama di negara-negara sedang berkembang, konsep pemberdayaan masyarakat bahkan diusung dan dituangkan dalam berbagai rencana program pembangunan yang menyerap

alokasi anggaran yang tidak sedikit. Dengan dalih pemberdayaan pula anggaran pembangunan yang telah dibelanjakan setiap tahun seringkali tidak dapat dilihat outputnya secara riil. Sehingga tujuan dari program pemberdayaan yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi suatu konsep abadi yang terus akan diwujudkan kedalam program-program dan proyek pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan daerah selalu mengalokasikan sejumlah besar anggaran untuk kegiatan yang berdalih untuk pemberdayaan masyarakat setiap tahunnya, sehingga kegiatan tersebut dapat dikatakan.

Menjadi ritual rutinitas yang selalu ada tanpa dievaluasi secara obyektif apakah hasil atau output program pemberdayaan tersebut sudah seperti yang seharusnya dicapai. Kegagalan dalam mencapai tujuan berbagai program pembangunan yang menggunakan pendekatan atau strategi pemberdayaan masyarakat terletak antara lain dari kurang dipahaminya makna konsep pemberdayaan itu sendiri. Pemahaman terhadap konsep pemberdayaan memang sangat beragam. Pemberdayaan dapat dilihat baik sebagai orientasi nilai di masyarakat maupun sebagai suatu model teoritis untuk memahami proses dan konsekuensi dari upaya untuk mengendalikan dan mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kehidupan seseorang, fungsi organisasi, dan kualitas kehidupan masyarakat (Perkins & Zimmerman, 1995)

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *Empowerment*, yang bisadiartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Abu Hurairah, 2011:82). Pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah upaya dalam meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok dalam melaksanakan suatu tugas sebagaimana tuntutan kinerja dari tugas tersebut untuk mencapai perubahan sosial³⁴. Bagaimana makna dari pemberdayaan sendiri memperlihatkan bahwa pemberdayaan terkait erat dengan sumber daya manusia dalam mencapai perubahan sosial.

Perbedaan juga terdapat pada proses pemberdayaan. Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua

kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian sumber daya yang bisa berupa kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses yang pertama tersebut disebut juga sebagai kecenderungan primer yang sesuai dengan makna pemberdayaan itu sendiri. Kedua disebut sebagai kecenderungan sekunder yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Adapun tujuan pemberdayaan adalah mengubah masyarakat yang tidak atau kurang berdaya menjadi lebih berdaya. Menurut Sulistiyani (2004) tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi.

Selain itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong maupun memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan nyata³⁵. Pemberdayaan akan mampu membuat masyarakat sadar terhadap potensi dirinya dan termotivasi untuk membuat potensi tersebut dalam sebuah tindakan yang nyata.

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan

ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang merangkum multi-aspek. Konsep ini mewakili paradigma baru pembangunan (post-developmentalism paradigm), yang bersifat *people centred, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995).

Paradigma pemberdayaan masyarakat lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki *inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*” (Kartasasmita, 1997). Intinya adalah *agency, self-determination, dan self-help* dengan basis *sustainability*.

Menurut Sumodiningrat (2002), upaya memberdayakan masyarakat harus dilihat dari tiga sisi. Pertama, upaya itu harus mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, ia harus memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Ketiga, ia juga mengandung pula arti melindungi. Menurut Ife (2002), program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila ia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan. Prinsip-prinsip inilah yang bila diterapkan secara konsekuen akan menjadikan program pemberdayaan tersebut sebagai pemberdayaan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat.

Menurut Sulistiyani secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan (Sulistiyani, 2004:77). Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Edi Suharto, 2010: 60).

Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya (Rakib dan Syam, 2016). Menurut Kartasasmita dalam Andriyani, Martono, dan Muhamad (2017), bahwa “Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan”. Menurut Noor (2011), bahwa: Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya masyarakat dapat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan.

Menurut Meutia, Intan Fitri and Yulianti, Devi (2019) pemberdayaan masyarakat memerlukan fasilitator dari instansi dan lembaga yang terkait dalam tahap penyadartahuan ini. Peran fasilitator diperlukan untuk memotivasi atau mendorong masyarakat agar aktif berperanserta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Fasilitator juga dibutuhkan untuk menyadartahukan masyarakat mengenai potensi-potensi yang dimiliki dan

dapat dikembangkan dan diberdayakan. Menurut Moh. Ali Aziz, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kesumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka (Moh Ali Aziz, dkk, 2005:136). Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Sehingga pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup (on going) dan sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja. Sebagai suatu program, pemberdayaan dilihat dari tahapantahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya (Isbandi Rukminto Adi, 2002:172171). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dengan cara memfasilitasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan terlepas dari kemiskinan.

b. Tahapan Pemberdayaan

Proses pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan selamanya, melainkan hingga masyarakat mampu untuk mandiri dan dilepaskan ketika sudah mandiri melalui berbagai proses hingga dapat dikatakan mandiri. Menurut Sumodiningrat yang dikutip oleh Sulistiyani (2004:83) terdapat beberapa tahap proses belajar untuk mencapai status mandiri tersebut. Tahapan-tahapan tersebut adalah :

- a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

- b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahapan-tahapan dari proses belajar dalam pemberdayaan suatu masyarakat dapat dilihat juga melalui kedewasaan sikap masyarakat seperti pada tabel berikut:

Tabel. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan afektif	Tahapan kognitif	Tahapan psikomotorik	Tahapan konatif
Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan Pengetahuan	Belum memiliki keterampilan Dasar	Tidak berperilaku membangun
Tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian	Menguasai pengetahuan Dasar	Menguasai keterampilan Dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan
Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan keterampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan
Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan padatingkat yang lebih Tinggi	Memperkaya variasi keterampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

Sumber: Sumodiningrat dikutip oleh Sulistiyani (2004:84)

Tabel tersebut menjelaskan bagaimana peningkatan afeksi, kognisi, psikomotorik, dan konatif dalam suatu pemberdayaan masyarakat. Suatu masyarakat memerlukan untuk melewati berbagai tahapan untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup suatu masyarakat atau kelompok tersebut. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu alternatif pembangunan yang mengubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dengan

melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Menurut Fahrudin (2011:96) terdapat tiga hal pokok dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a) Enabling, menciptakan suatu iklim yang dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dalam memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya dalam upaya mengembangkan potensi yang ada.
- b) Empowering, meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki untuk membuka akses pada peluang dan penyediaan berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar input dan output.
- c) Protecting, melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem yang diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktik eksploitasi yang berguna sebagai perlindungan bagi masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan selamanya, namun hanya hingga masyarakat itu berdaya dan pemberdayaan yang diberikan telah mencapai keberhasilan. Sumodiningrat (1999) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat

- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat beberapa strategi pemberdayaan dimana strategi tersebut berbeda-beda menyesuaikan dengan kliennya. Dalam hal ini klien dapat berupa individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat itu sendiri. Strategi pemberdayaan tersebut mempertimbangkan tiga bentuk intervensi, yaitu intervensi mikro (sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas atau task centered approach), mezzo, dan makro (sering disebut sebagai system strategy).

Tabel. Strategi Pemberdayaan dengan mempertimbangkan tiga bentuk intervensi

Pendekatan	Sasaran	Teknik	Tujuan
Mikro	Individu, keluarga	Konseling, terapi, bimbingan, pembinaan, manajemen stress, konseling, perkawinan, dan intervensi krisis	Mengurangi tekanan, menumbuhkan kesadaran, <i>self image</i> , konsep diri, tumbuhnya motivasi, Mengenal potensi, kemampuan dan kelemahan, mengarahkan, membimbing dan melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
Mezzo	Kelompok, <i>peer group</i> , <i>self-help group</i>	Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok	Peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap-sikap agar dapat mengatasi masalah sendiri dan kelompok.
Makro	Komunitas dan masyarakat	Kebijakan sosial, perencanaan	Partisipasi masyarakat, meningkatkan

		sosial, kampanye, <i>lobbying</i> , media massa, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik	performa/kinerja organisasi, perubahan kebijakan, dan perubahansosio ekonomi.
--	--	---	---

Sumber: hasil adaptasi Ife, Parson, Jorgensen, dan Hernandes, serta Netting Kettner, dan McMurtry dalam Fahrudin (2011).

Tabel tersebut menjelaskan berbagai strategi dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari klien atau objek pemberdayaan. Setiap klien atau objek pemberdayaan memiliki strategi pemberdayaan yang berbeda dikarenakan setiap klien memiliki karakteristik dan tujuan yang ingin dicapai dari klien tersebut berbeda-beda. Dengan penggunaan strategi pemberdayaan yang tepat diharapkan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan dapat tercapai.

C. Konsep Industri Kreatif

Industri kreatif adalah industri yang menghasilkan output dari pemanfaatan kreativitas, keahlian dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup (Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025). Menurut Hasanah (2015), bahwa “Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep di era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusianya sebagai faktor produksi yang utama”. Studi pemetaan industri kreatif yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2007), memberikan definisi industri kreatif, yaitu "Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreatif dan kreativitas individu”.

Industri kreatif adalah industri yang mengandalkan talenta, keterampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar setiap individu (Ananda dan

Susilowati, 2018). Menurut Rakib, Yunus, dan Amin (2018), Elemen utama dari industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan bakat yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran ciptaan intelektual.

Industri kreatif merupakan kegiatan industri yang memerlukan ide dan gagasan sebagai rancangan pengembangannya. Banyak sektor yang bisa dijelajahi dan dikembangkan dalam industri kreatif. Salah satu sektor yang menjanjikan apabila dikembangkan secara komitmen adalah industri wisata yang berbasis kearifan lokal. Diawal abad ke-21 industri kreatif telah menjadi alternatif jangka panjang dalam pemecahan masalah ekonomi suatu negara. Dalam temuan Howkins (yang dikutip oleh Kamil, 2015:169), industri kreatif Amerika di tahun 1996 mendulang pendapatan senilai 60,18 milyar dollar (sekitar Rp.600 triliun), pendapatan tersebut jauh melampaui pendapatan industri mainstream lain seperti otomotif, pertanian, dan pesawat. Temuan tersebut mengindikasikan adanya gelombang ekonomi baru yang didasari oleh pengembangan kreatifitas dan intelegensi lanjutan.

Menurut Departemen Perdagangan RI (2009:5) Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Simatupang (2008:69) menjelaskan bahwa industrikreatif adalah industri yang mengandalkan talenta, ketrampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar setiap individu. Unsur utama industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi mening-katkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Sementara itu, di kalangan para pakar dalam bidang tersebut, nampaknya tidak ada perbedaan pengertian yang mendasar antara Ekonomi Kreatif dengan Industri Kreatif. Ditinjau dari aspek kebutuhan praktis, sebenarnya bukan merupakan persoalan yang serius. Secara umum dapat dikatakan bahwa keduanya mengandung pengertian sebagai aktivitas berbasis kreativitas yang berpengaruh terhadap perekonomian atau kesejahteraan masyarakat.

Menurut Moelyono (2010) Industri kreatif digerakkan oleh beberapa faktor. Dalam hal ini, Richard Florida (dikutip dari Moelyono,2010) menawarkan konsep 3 T:

1. Talenta (Talent)

Proses kreasi harus dibekali oleh bakat (talenta) yang cukup, kemampuan ini bisa menggerakkan perusahaan-perusahaan untuk proaktif, tidak mengikuti trend tetapi menciptakan trend.

2. Toleransi (Tolerance)

Ini berkaitan dengan iklim keterbukaan, di mana adanya toleransi yang tinggi di antara komunitas, yaitu komunitas yang menghargai perbedaan dan karya cipta orang lain akan mendorong tumbuh kembangnya kreativitas.

3. Teknologi (Technology)

Teknologi dapat menunjang produktivitas karena kemudahan dalam mengakses dan membeli teknologi serta transfer teknologi adalah faktor penting dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Berdasarkan uraian para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur utama industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, toleransi, teknologi dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual.

1. Sektor-sektor dalam Industri Kreatif

Klasifikasi industri kreatif yang ditetapkan oleh setiap Negara berbeda-beda. Pengklasifikasian industri kreatif tergantung pada tujuan analitik dan potensi suatu negara. Industri kreatif yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) subsektor industri kreatif. Menurut Akhmad dan Hidayat (2015), bahwa: Ada 14 subsektor Ekonomi Kreatif, yaitu: (1) Periklanan; (2) Arsitektur; (3) Pasar Barang Seni; (4) Kerajinan; (5) Desain; (6) Fesyen (Fashion); (7) Video, Film, dan Fotografi; (8) Permainan Interaktif (Game); (9) Seni Pertunjukan (Showbiz); (10) Penerbitan dan Percetakan; (11) Layanan

Komputer dan Piranti Lunak (Software); (12) Televisi dan Radio (Broadcasting); (13) Riset dan Pengembangan (R&D); (14) Kuliner.

2. Pilar Industri Kreatif di Indonesia

Seperti halnya sebuah rumah yang membutuhkan pilar untuk bisa tetap berdiri tegak, ekonomi kreatif memiliki 5 pilar yang perlu terus diperkuat sehingga industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang mencapai visi dan misi ekonomi kreatif Indonesia 2025. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (2014), dalam buku *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia*.

Menuju 2025, kelima pilar ekonomi kreatif tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Pendukung

Sumber daya yang dimaksud di sini adalah input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah, selain ide atau kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya insani yang bisa menjadi landasan dari industri kreatif karena sumber daya alam maupun ketersediaan lahan yang menjadi input penunjang dalam industri kreatif. Baik sumber daya alam maupun sumber daya budaya merupakan input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah karya kreatif. Banyak sumber daya alam khas Indonesia yang dapat menjadi input karya kreatif, seperti rotan, kayu, dan serat nanas. Sumber daya budaya Indonesia pun juga sangat beragam.

b. Industri

Industri merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi produk atau jasa. Pengembangan industri kreatif tidak hanya meliputi industri utamanya saja, dalam hal ini 15 industri kreatif yang menjadi fokus pengembangan ekonomi kreatif, tetapi juga industri pendukungnya, seperti industri pengolahan produk kayu bagi industri kerajinan. Selain itu, lingkungan pengembangan juga perlu mendapatkan

perhatian, seperti dunia pendidikan yang akan menumbuhkembangkan orang kreatif, serta media yang dapat mendorong distribusi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat.

c. Pembiayaan

Lembaga pembiayaan berperan dalam penyaluran pendanaan kepada pelaku industri yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal maupun pinjaman. Lembaga keuangan baik konvensional, seperti perbankan maupun nonkonvensional merupakan elemen penting dalam menjembatani kebutuhan keuangan orang kreatif dan pemilik modal.

d. Pemasaran

Karya kreatif akan bernilai ekonomi bila menemukan pasarnya. Untuk menemukan pasar bagi industri kreatif diperlukan riset pasar tentang selera pasar dan teknik pemasaran yang efektif sehingga karya kreatif tersebut dapat diterima pasar dengan nilai yang tinggi. Peluang pasar karya kreatif Indonesia terbuka lebar tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Merupakan tantangan bagi pemerintah untuk membantu orang kreatif memperluas akses pasar baik di dalam maupun di luar negeri.

e. Teknologi dan Infrastruktur

Teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas baik material dan nonmaterial, yang merupakan aplikasi penciptaan dari proses mental atau fisik untuk mencapai nilai tertentu. Dengan kata lain, teknologi bukan hanya mesin ataupun alat bantu yang sifatnya berwujud, tetapi teknologi ini termasuk kumpulan teknik atau metode-metode, atau aktivitas yang membentuk dan mengubah budaya. Teknologi bias dipakai dalam berkreasi, memproduksi, berkolaborasi, mencari informasi, distribusi dan sarana bersosialisasi. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah penyediaan infrastruktur, tidak hanya infrastruktur fisik seperti jalan, tetapi juga infrastruktur nonfisik seperti akses internet.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam mengembangkan industri kreatif yang ada di dalam suatu negara maka dibutuhkan sumber

daya pendukung, industri, pembiayaan, pemasaran, serta teknologi dan informasi sebagai pilar yang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif tersebut.

3. Indikator Keberlangsungan Ekonomi Kreatif

Dalam memulai suatu usaha, tentu terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi keberlangsungan usaha tersebut. Sama halnya dalam ekonomi kreatif yang memiliki beberapa indikator yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartomo dan Cahyadin (2013: 225), bahwa: Ada beberapa indikator keberlangsungan usaha ekonomi kreatif, yaitu: (1) Produksi, (2) Pasar dan Pemasaran, (3) Manajemen dan Keuangan, (4) Kebijakan Pemerintah, (5) Kondisi Ekonomi, (6) Lingkungan, (7) Kemitraan Usaha, (8) Keluarga.

D. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Menurut Pandji Anorangga (1997) UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah. Perkembangan UMKM adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. Kriteria usaha mikro kecil dan menengah menurut UU NO.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Definisi UMKM di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab I (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan. Sedangkan usaha kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan. Di dalam UU tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun

2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun pengertian UKM menurut Suhardjono dalam Rafika (2010) mendefinisikan Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang – undang. Kriteria perusahaan di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja 1 - 4 orang sebagai usaha rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5 – 19 sebagai usaha kecil, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20 - 99 sebagai.

Definisi UMKM menurut Kementrian Koperasi dan UMKM dalam AUFAR (2014:8) : Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan

tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam AUFAR (2014:9) : Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 500.000.000) dan non manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 600.000.000).

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu.

2. Kriteria UMKM

Tabel. Jenis Usaha Sesuai Kriteria Asset Dan Omzet

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	>500 Juta-10 Milyar	>2,5 Milyar-50 Milyar

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- a. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

E. Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2018:60) mengemukakan bahwa: “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.

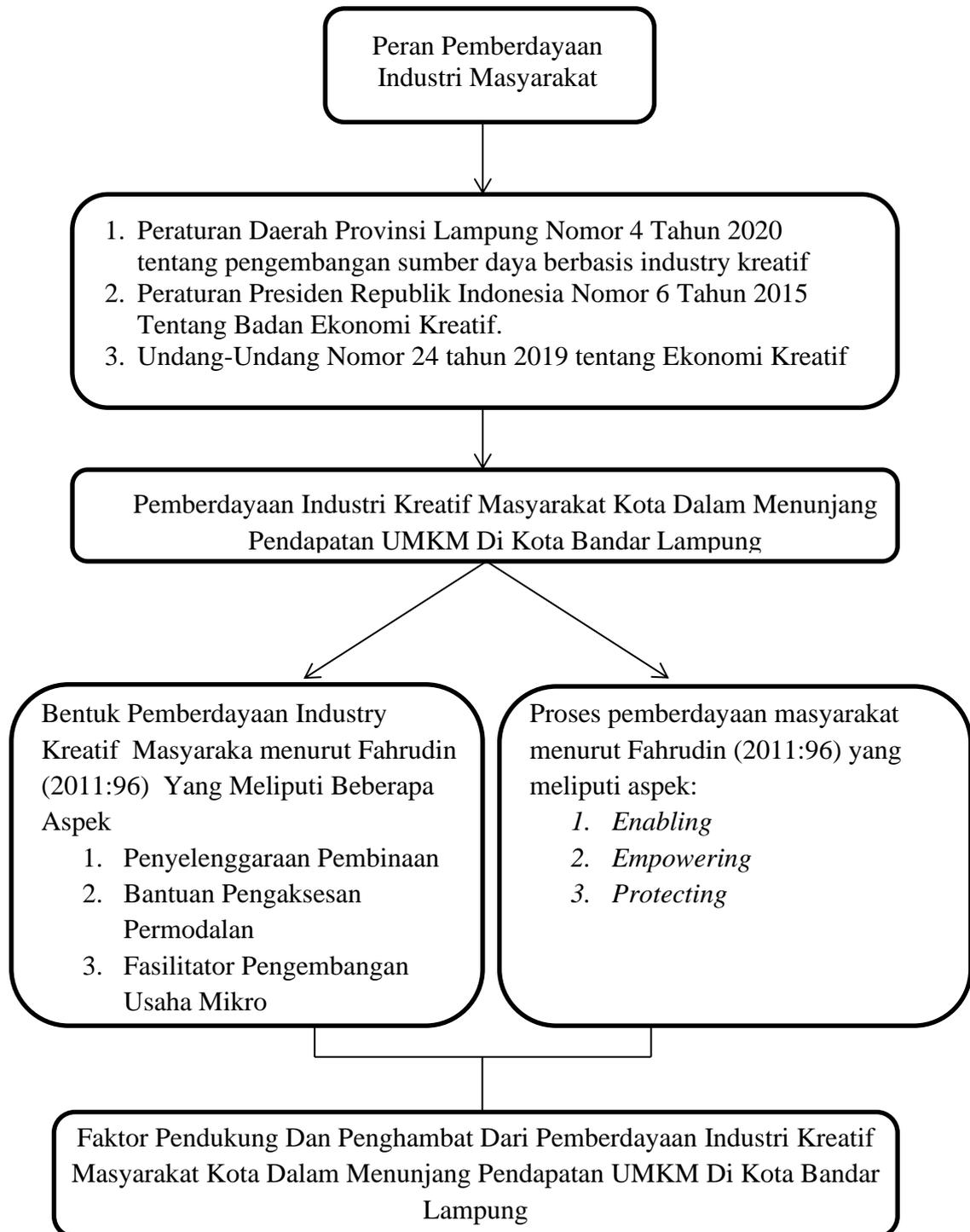
Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya menggenjot usaha ekonomi melalui pemberdayaan industry kreatif yang ada diseluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung bersama dinas terkait akan terus menggali sumber potensi yang ada untuk dikembangkan secara optimal, demi menunjang pembangunan khususnya pembangunan ekonomi.

Industry kreatif harus lebih dioptimalkan, sehingga para pelaku Umkm di daerah itu dikenal luas. Pemkot akan terus mendorong peberdayaan industry kreatif itu betul-betul menjadi harapan baru buat masyarakat Kota Bandar Lampung, sehingga tumbuh dan berkembang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengembangan sumber daya berbasis industry kreatif dan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, serta Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, bahwa dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, perlu pengembangan sumber daya berbasis industry kreatif melalui pemberdayaan masyarakat karena industry kreatif mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta nasional, karena mampu menyerap ribuan tenaga kerja bagi sektor padat karya, khususnya dalam meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM.

Dalam pemberdayaannya sendiri menurut Fahrudin (2013:96) Bentuk pemberdayaan masyarakat yang meliputi aspek: 1) Penyelenggaraan pembinaan, 2) Bantuan Pengaksesan Permodalan, 3) Fasilitator Pengembangan Usaha Mikro, yang dimana dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat 3 aspek yang meliputi Enabling, Empowering dan Protecting, sehingga dapat di temukan faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pemberdayaan industry kreatif masyarakat kota dalam menunjang pendapatan UMKM di Kota Bandar Lampung



Gambar. Kerangka pemikiran

Sumber: Di Olah peneliti, 2021

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang secara umum yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi harus dipandang sebagai bagian dari keutuhan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis bermaksud untuk memaparkan mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu mendeskripsikan tentang pemberdayaan industri kreatif masyarakat kota untuk menunjang pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di bandar lampung.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batas suatu susunan permasalahan yang akan dibahas dan dikaji secara mendalam. Menurut Moeleong (2004:97) Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan batas yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan perumusan tentang peran pemberdayaan industri kreatif masyarakat kota untuk menunjang pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di bandar lampung.

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Usaha Mikro, dilihat dari:

- A. Bentuk pemberdayaan masyarakat yang meliputi aspek:
1. Penyelenggaraan pembinaan, dilihat dari apa yang dibina, kapan pembinaan itu dilakukan, dimana pembinaan tersebut dilaksanakan, siapa yang membina, bagaimana bentuk pembinaan itu, dan mengapa pembinaan.
 2. Bantuan Pengaksesan Permodalan, dilihat dari apa bentuk bantuan pengaksesan permodalan, kapan bantuan pengaksesan permodalan diberikan, siapa yang memberikan bantuan, bagaimana bantuan tersebut diberikan, dan mengapa bantuan pengaksesan permodalan.
 3. Fasilitator Pengembangan Usaha Mikro, dilihat dari apa bentuk fasilitator pengembangan usaha mikro, siapa yang memberikan fasilitator pengembangan, kapan fasilitator pengembangan tersebut diberikan, dimana fasilitator pengembangan dilaksanakan, bagaimana fasilitator pengembangan tersebut, dan mengapa fasilitator pengembangan usaha mikro.
- B. Proses pemberdayaan industry kreatif masyarakat menurut Fahrudin (2011:96) yang meliputi aspek:
1. *Enabling*, menciptakan suatu iklim yang dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dalam memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya dalam upaya mengembangkan potensi yang ada
 2. *Empowering*, meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki untuk membuka akses pada peluang dan penyediaan berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar input dan output.
 3. *Protecting*, melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem yang diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktik eksploitasi yang berguna sebagai perlindungan bagi masyarakat.

2. Faktor pendukung dan penghambat dari pemberdayaan industry kreatif masyarakat dalam menunjang pendapatan UMKM di Kota Bandar Lampung, dilihat dari:
 - A. Faktor Pendukung
 1. Adanya Komunitas UKM.
 2. Dukungan dari Instansi-Instansi Lainnya.
 3. Peran Serta Masyarakat dalam Pemberdayaan
 - B. Faktor Penghambat
 1. Permasalahan Teknis Usaha Mikro.
 2. Keterbatasan Permodalan.
3. Alasan peneliti mengambil fokus ini yaitu karena di era sekarang industri kreatif merupakan salah satu cara untuk menunjang perekonomian daerah terutama untuk pelaku usaha usaha kecil dan menengah, dimana sumber utama nya adalah sumber daya manusia yang memiliki kreatifitas atau ketrampilan. Dan peneliti hanya berfokus pada satau UKM yaitu usaha mikro Alyn Tapis di karenakan ada nya keterbatasan waktu penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian (Moleong, 2017:128). Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat. Adapun lokasi penelitian yang di lakukan dalam mencari data yaitu berlokasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung. Dan , Ibu Novitaria pemilik Alyn Tapis yang berlokasi di kecamatan Kedaton.

D. Sumber Data

Definisi data sendiri merupakan suatu catatan dari kumpulan fakta yang ada, dapat berbentuk kata, angka maupun lainnya (Moleong, 2016). Jenis-jenis data yang digunakan antara lain :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Untuk mendapatkannya peneliti menggunakan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang di dapatkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2016). Hasil yang diharapkan dari wawancara dengan para informan adalah mendapatkan data yang akurat yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan beberapa informan atau narasumber. Adapun informan atau narasumber yang diwawancarai adalah pegawai Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung serta pengelola atau pelaku industri Kreatif.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel dan buku-buku penunjang lainnya sebagai teori. Data yang diperoleh dari sekunder tidak perlu diolah lagi. Data sekunder digunakan pada penelitian ini berupa data mengenai gambaran umum tempat penelitian yaitu Kota Bandar Lampung.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat yang digunakan membantu dalam pengumpulan data dalam penelitian. Dalam metode kualitatif, peneliti sendiri adalah alat pengumpulan data dan tidak dapat diwakilkan atau didelegasikan berarti bahwa peneliti terlibat langsung dengan peserta atau partisipan (Raco, 2010: 77-78). Maka kompetensi peneliti tentang topik yang akan diteliti merupakan hal yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif. Adapun hal yang dilakukan peneliti atau yang menjadi instrumen penelitian dalam penelitian ini yakni melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian ini juga merupakan ciri khas penelitian kualitatif dimana tidak dapat dipisahkan dari pengamatan dan membutuhkan peran aktif dari peneliti selain itu peneliti juga menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang bersifat terbuka, pedoman dokumenter, pedoman observasi dan menggunakan alat bantu lainnya (buku catatan, ballpoint, pensil, dan lain-lain).

Tabel. Informan Penelitian

Jabatan	Jumlah Orang
ibu Elsi Wijayanti, S.H selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Bandar Lampung	1
ibu Elvi Dewi, S.E selaku Kepala Sub Bag Program, Keuangan dan Aset Dinas koperasi Dan UMKM Kota Bandar Lampung	1
Pelaku Industri Kreatif 1) Ibu Novitaria pemilik usaha sulam usus dan tapis di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	1

Sumber : Di olah Oleh Penulis, 2022

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung secara sistematis terhadap objek penelitian dan

mencatat gejala-gejala yang diteliti yang berhubungan dengan Pemberdayaan industry masyarakat di Kota Bandar Lampung, sehingga diperoleh fakta-fakta yang jelas. Adapun observasi yang penulis lakukan yaitu mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku Pelaku Industri Kreatif.

2. Wawancara Mendalam (*Indepth-Interview*)

Wawancara mendalam (*indepth-interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Adapun target yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah pegawai dinas pariwisata dan pengelola industri kreatif. Alasan peneliti mewawancarai pegawai dinas pariwisata dan pengelola industry kreaatif karena dinas pariwisata sebagai instansi pemerintah memiliki informasi penting dalam pengelolaan maupun pemberdayaan industri kreatif baik itu dalam bentuk kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti buku-buku, laporan, jurnal, literature, majalah dan peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Data-data dan foto-foto di lapangan yang berkaitan dengan tema penelitian yang diteliti. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian dan dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan sampai pada akhir dan berinteraksi dengan latar dan orang (subjek)

dalam rangka pengumpulan data. Menurut Bogdan (Sugiyono, 2012) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Nasution (Sugiyono 2015:245) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Berdasarkan pernyataan di atas, analisis data dalam penelitian kualitatif sebelum peneliti memasuki lapangan yaitu dengan melakukan studi pendahuluan atau pra-penelitian untuk menentukan fokus permasalahan. Pada saat penelitian berlangsung dilapangan analisis data dilakukan secara interaktif yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung. Maka hal ini sejalan dengan model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:246) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Berdasarkan penjelasan di atas, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa komponen yaitu:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2015:249) Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data dimaknai sebagai proses memilah dan memilih hal-hal yang pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja. Dengan demikian hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Menurut Sugiyono (2015:249) dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (Sugiyono 2015:249) menyatakan “The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan, untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Conclusion Drawing/Verivication

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Menurut Sugiyono (2015:252) bahwa: “Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori”.

H. Tehnik Keabsahan Data

Keabsahan data yaitu kredibilitas, tranferabilitas, audibitas (dipendabilitas), konfirmabilitas dan triangulasi. Salah satu atau lebih dari berbagai teknik ini dapat dipilih untuk mencapai keabsahan data. Karena peneliti sendiri yang paling mengetahui keabsahan data, maka peneliti seharusnya menampilkan kejujuran. Manipulasi data akan mengakibatkan keabsahan data menjadi berkurang nilai keilmiahannya. Keabsahan data harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut (Endaswara, 2006: 110-112):

1. Kredibilitas

Memperpanjang cara observasi agar cukup waktu untuk mengenal responden, lingkungannya dan kegiatan serta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pengamatan terus menerus agar peneliti dapat melihat sesuatu

secara cermat, terinci dan mendalam sehingga hasil akhir yang didapatkan dapat menjadi hasil yang dapat dipercaya.

2. Transferabilitas

Merupakan validitas eksternal berupa keteralihan, yakni sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau disejajarkan pada kasus di daerah lain. Kemiripan antar subyek dan data penelitian merupakan indikator adanya kemungkinan tranferabilitas.

3. Auditabilitas dan dependabilitas (reliabilitas)

Merupakan konsistensi atau sekurang-kurangnya ada kesamaan hasil bila diulang oleh peneliti lain, untuk mengetahui hal ini dilakukan langkah-langkah seperti: pengamatan ulang, cheking data dan audit trail.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebagai perangkat daerah yang menaungi usaha mikro di Kota Bandar Lampung, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan untuk mewujudkan koperasi dan usaha mikro sebagai lembaga usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh dan mandiri. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung berupaya untuk mengembangkan usaha mikro melalui pemberdayaan yang menjadikan usaha mikro di Kota Bandar Lampung sebagai objek pemberdayaan itu sendiri. Salah satu usaha mikro yang berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung adalah usaha mikro Alyn Tapis yang berlokasi di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Usaha Mikro Alyn Tapis bergerak pada bidang industri Kriya tersebut baru bergerak selama dua tahun setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandart Lampung.
2. Prospek usaha mikro di masa yang akan datang merupakan sebagai stabilisator dan pendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan bangsa dan negara. Pemerintah menargetkan bagi UMKM dalam perkembangan era ekonomi digital untuk go online pada tahun 2019 dan menjadi pemain utama dari era ekonomi digital. Terbukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 mengharuskan para pelaku usaha mikro untuk siap bersaing tidak hanya dengan pasar lokal namun dengan pasar internasional. Posisi usaha mikro di era MEA dapat menguntungkan apabila dibarengi dengan adanya peningkatan kualitas usaha, namun posisi usaha mikro dapat pula terancam

dan tergerus oleh persaingan yang masuk tidak hanya dari dalam negeri namun juga luar negeri. Tanpa adanya daya tarik dari produk usaha mikro lokal, maka posisi usaha mikro tidak akan dapat bersaing dengan produk-produk lain baik lokal maupun impor yang jauh lebih kompetitif.

3. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bandar Lampung Dalam Menunjang Pendapatan UMKM dilihat dari:

A. Pemberdayaan masyarakat meliputi aspek penyelenggaraan pembinaan, penyaluran bantuan sosial, serta melalui fasilitator pengembangan usaha mikro.

1. Penyelenggaraan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung diselenggarakan bagi pemilik usaha mikro maupun usaha pemula yang merupakan anggota binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari, hari pertama merupakan penyampaian teori dan hari kedua dan ketiga untuk pelatihan dari segi praktik. Teori yang diberikan saat pelatihan berupa teori tentang manajemen usaha, sedangkan untuk praktik pada hari kedua dan ketiga berupa pelatihan-pelatihan seperti pelatihan Pembuatan Sulam Usus, Pengemasan produk
2. Pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung merupakan bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk memberikan bantuan pendanaan bagi usaha mikro maupun UKM yang membutuhkan bantuan tersebut. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung berperan untuk menyampaikan bantuan sosial tersebut kepada usaha mikro binaannya serta mengumpulkan dokumen dan verifikasi berkas atas usaha mikro yang mengajukan bantuan pendanaan tersebut.

3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung sebagai fasilitator pengembangan usaha mikro memberikan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta pengurusan label halal bagi produk makanan maupun minuman binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung. Pemberian tersebut tidak dilakukan secara rutin, namun pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung rutin melakukan sosialisasi dan pemanduan bagaimana cara mengurus ketiga hal tersebut ataupun surat-surat yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha.

B. Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung Dalam Menunjang Pendapatan UMKM meliputi proses enabling, empowering dan protecting.

1. Proses pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung bagi usaha Mikro Alyn Tapis telah mencapai tahapan psikomotorik dimana para pelaku usaha mikro tersebut telah menguasai keterampilan dasar serta mulai mengembangkan keterampilan dasar yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung. Tahapan tersebut dicapai setelah para pelaku usaha mikro Alyn Tapis mengikuti berbagai pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung serta memanfaatkan kesempatan untuk mengurus hak kekayaan intelektual yang diberikan secara gratis bagi usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung.
2. Enabling yaitu menciptakan suatu iklim yang dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dalam memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya dalam upaya mengembangkan potensi yang ada melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung untuk memotivasi dan mendorong para pelaku usaha ataupun individu yang belum

memiliki usaha untuk mengembangkan usaha mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada.

3. Empowering yaitu proses pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki untuk membuka akses pada peluang dan penyediaan berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar input dan output. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membuka Klinik Bisnis yang memiliki fungsi untuk memberikan masukan bagi permasalahan yang berkaitan dengan pasar input dan pasar output yang dihadapi oleh usaha mikro terutama wirausaha pemula. Selain pemberian fasilitasi berupa Klinik Bisnis, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung menciptakan iklim empowering yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki melalui pemberian fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau label halal secara gratis untuk meningkatkan mutu dari produk itu sendiri sehingga hasil produksi usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung memiliki daya saing sebagai upaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki. Untuk membuka akses pasar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung memfasilitasi bagi para usaha mikro binaannya untuk mengikuti Display UKM yang diselenggarakan di Kota Bandar Lampung maupun di luar kota dan dalam kotya
4. Protecting yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem yang diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktik eksploitasi yang berguna sebagai perlindungan bagi masyarakat. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung memantau perbedaan yaitu kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh suatu usaha dengan usaha lainnya sehingga dari kelebihan-kelebihan tersebut bisa mengisi kekurangan yang dimiliki usaha lainnya. Kelebihan yang dimiliki suatu usaha mikro akan diajarkan kepada usaha mikro yang serupa

sehingga kedua usaha tersebut dapat berkembang secara bersamaan.

4. Faktor pendukung dan penghambat dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung dalam pengembangan UKM adalah:
 - A. Faktor pendukung: adanya paguyuban UKM, dukungan dari instansi- instansi lainnya dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan
 - B. Faktor penghambat: permasalahan teknis usaha mikro yang meliputi permasalahan pemasaran produk dan manajemen usaha, serta keterbatasan permodalan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemberdayaan industri kreatif masyarakat dalam menunjang pendapatan UMKM di Kota Bandar Lampung, maka penulis mempunyai rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah Kota Bandar Lampung disini sebagai pemegang kewenangan dari pemerintah pusat harus berperan lebih optimal lagi dalam upayanya memberdayakan Industri Kreatif khususnya dalam menunjang pendapatan UMKM di Kota Bandar Lampung. Peran pemerintah disini diharapkan lebih intens terjun ke masyarakat atau memikirkan kembali langkah-langkah yang harus di tempuh bagi keberlangsungan terhadap program yang dilaksanakan sehingga nantinya program ataupun regulasi yang keluar dapat tepat sasaran, efektif dan efisien juga.

Pemerintah juga perlu melakukan sebuah evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan, dari situ akan menghasilkan data yang nantinya dapat menjadi tolak ukur atas target yang sudah ditetapkan di awal dan juga bisa

digunakan sebagai tumpuan untuk regulasi maupun program-program yang dibutuhkan ke depan, Hal yang harus diperhatikan lagi oleh pemerintah terkait hal bantuan pinjaman modal serta pembangunan prasarana. Pemerintah harus lebih lagi dalam memberikan bantuan prasarana tidak hanya di satu bidang industry kreatif saja tetapi di harapkan semua sub sector industry kreatif yang dapat menunjang pendapatan harus lebih di berikan bantaun sarana dan prasarana karena dapat meningkatkan kualitas hasil produksi para pelaku UMKM.

2. Bagi Pelaku UMKM

Para Pelaku UMKM disini sebagai sasaran dari upaya maupun peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM itu sendiri juga punya peran penting dalam keberhasilan pemberdayaan tersebut. Keberhasilan dari pemberdayaan ini juga tergantung terhadap respon dan antusias para pelaku UMKM menyambut upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan peran dan kewenangannya. Pelaku UMKM harus lebih responsif dan antusias guna membantu pemerintah menghasilkan regulasi atau program yang efektif serta efisien dan para pelaku UMKM harusnya bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang telah di berikan oleh pemerintah dalam membantu mengembangkan usaha mereka. Dari respon yang baik dan aktif nanti juga akan menimbulkan sinergitas antara para pelaku UMKM dengan pemerintah. Respon yang aktif dan baik disini dapat diwujudkan melalui forum atau dialog yang dibuat oleh para pelaku UMKM guna membahas kebutuhan apa saja yang dibutuhkan serta masalah apa saja yang dihadapi. Hasil tersebut nantinya dapat diaudiansikan oleh perwakilan dari para pelaku UMKM terhadap pemerintah sehingga terjadi komunikasi yang baik antara pelaku UMKM dengan pemerintah dan nantinya regulasi dan aturan yang ada sesuai dengan apa yang diharapkan para pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abu Huraerah. (2011). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Adi, Isbandi Rukminto. (2002). *Pemikiran-Pemikiran dalam pembangunan kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI
- Akerklof George, Paul M. Romer.,(1993). *Looting : The Economic Underworld of Bankruptcy for Profit*.
- Alvin Toffler (1980), *The Third Wave*, Penerbit Penguin Book, England
- Anwas, Oos. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta
- Anoraga, Pandji. (1997). *Psikologi Kerja*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ambar Teguh Sulistiani. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gala Media.
- Aziz, Moh. Ali dkk, (2005), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Kota Bandar Lampung dalam Angka. Bandar Lampung: BPS Bandar Lampung Creative Hub. (2019). 02(1), 2019.*
- Chambers, Robert. (1995). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Yogyakarta : LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial)
- Cornell Empowerment Group (1989). Empowerment and family support. *Networking Bulletin*, 1(2), 1-23.
- Diva, Gede.(2012), *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta: Bakric School of Management.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. (2008) . *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025: Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2025* . Jakarta: Departemen Perdagangan

- Edi Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Endaswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik, Penelitian Kebudayaan*. Pustaka Widyatama.
- Friedman, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers. Cambridge, USA
- Howkins, John, (2001), *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas*, Penguin Book, England
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero, (2002), *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, terj. Sastrawan Manullang dkk. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Indriyani, Ety. (2020). *Industri Kreatif Pariwisata Bernilai Kearifan Lokal*. Yogyakarta : Deepublish.
- Khristanto, Wheny. (2012). *Peluang dan Tantangan Industri Kreatif di Indonesia*
- Kartasmita Ginanjar. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tinjauan Administrasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brwajiya ; Bandung
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Narwoko. Dwi dan Bagong Suyanto.(2004). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Kencana
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Pranarka, A.M.W dan Vidhyandika. (1996). *“Pemberdayaan (empowerment)”* Dalam Onny Prijono dan Pranarka (ed). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies
- Prihtiyani, E (2011), Wawancara Khusus dengan Mari Elka Pangestu; Lima Kendala Utama Ekonomi Kreatif. Kompas Travel (Online) diakses 7 April 2015, <http://travel.kompas.com/read/2011/11/08/02533938/Mari.Pangestu.Lima.Kendala.Utama.Ekonomi.Kreatif>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT Gramedi Widiarsana Indonesia.
- Rappaport, J. (1981) In praise of paradox: A social policy of empowerment over prevention. *American Journal of Community Psychology*, 9, 1-25.
- Simatupang, M.T. (2008). *Industri Kreatif untuk Kesejahteraan Bangsa*. ITB Bandung : Inkubator Industri dan Bisnis

- Sugiyono.(2012), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfa Beta Steers.
- Suharto, Edi. (2010). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, bandung: Refika Aditama
- Sulistiyani, Ambar Teguh, (2004). *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat , Gunawan, (2002). *Memberdayakan Masyarakat*. Jakarta: Perencana Kencana Nusadwina
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* . Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Soenyono. (2012). *Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)*. Surabaya : Jenggala Pustaka Utama.
- Soerjono, Soekanto. (2012), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Usman, Sunyoto. (2013). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zimmerman, M. A., & Warschausky, S. (1998). Empowerment theory for rehabilitation research: *Conceptual and methodological issues*. *Rehabilitation Psychology*, 43(1), 3-16.

Jurnal :

- Ananda Amin Dwi, Susilowati Dwi. (2012). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Berbasis Industri Kreatif Di Kota Malang*, *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol.10 jilid.10
- Ananda, AD & Susilowati D. (2018). *Pengembngan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. X (X): 120-142
- Anggraini, Nenny, (2008). “*Industri Kreatif*”, *Jurnal Ekonomi Desember 2008* Volume XIII No. v3
- Aufar, Arizali. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM (Survei Pada Perusahaan Rekanan PT. PLN(Persero) di Kota Bandung*
- Departemen Perdagangan RI (2009:5) *Industri Kreatif*
- Fitriana, A. N. (2014). *Pengembangan Industri Kreatif Di Kota Batu (Studi Tentang Industri Kreatif Sektor Kerajinan Di Kota Batu)*. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(2), 281–286.

- Hartomo, Deni Dwi; Cahyadin, Malik. (2013). *Pemeringkatan Faktor Keberlangsungan Usaha Industri Kreatif di Kota Surakarta*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 4 (2): 225
- Kagungan, D., & Yulianti, D. (2019). *The synergy among stakeholders to develop Pisang Island as marine tourism: The case of underdeveloped area*. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 32(1), 16-23. <https://doi.org/10.20473/mkp.V32I12019.16-23>
- Kamil, Ahmad. (2015). *Industri Kreatif Indonesia : Pendekatan Analisis Kerja Industri*. *Media Trend*, 10(2), 165-182
- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. (2014). *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. (2008). *Studi Industri Kreatif Indonesia*. Jakarta: Kementrian Perdagangan RI
- Meutia, Intan Fitri and Yulianti, Devi (2019) *PERANAN MASYARAKAT LOKAL DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG*. Seminar Nasional FISP UNILA 3. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/15217>
- Musthofa dan Gunawijaya. (2016). *Strategi Keberhasilan Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Kreativitas Seni Tradisi : Studi Kasus Saung Angklung Udjo , Bandung , Jawa Barat The Success Strategy Of Community Empowerment Process Through Creativity Of Arts Traditions : Case*. 325–339. <https://doi.org/10.33007/ska.v5i1.158>
- Noor, Munawar. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah CIVIS*. 1 (2): 87-99.
- Prihantika, Ita and Utoyo, Bambang and Rahmadhani, Tia Panca and Sutiyo, Sutiyo (2019) *MPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRONOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTAWISATA*. In: EMINAR NASIONAL FISIP UNILA (SEFILA) - 3 Tahun 2019, 8 Agustus 2019, Bandar Lampung
- Rakib, Muhammad; Syam, Agus. (2016). “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Life Skills Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Produktivitas Keluarga di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pirang*”. *Jurnal Administrasi Publik*. 6 (1): 96108. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i1.2155>

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Pasal 1 2015 Tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Internet :

<https://disperindag.lampungprov.go.id/detail-post/launching-bazar-rebo-ukm-ikm-se-provinsi-lampung> (Di akses Pada 6 Juni 2021)

<https://sumaterapost.co/wagub-lampung-resmikan-pasar-kreatif-dan-seni-way-halim/> (Di akses Pada 6 Juni 2021)